

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan infrastruktur kota dan pembangunan daerah dan desa semakin seimbang dan serasi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sebagai lokomotif pembangunan nasional juga berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan dasar. Program Dana Desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan juga sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah.

Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan momentum untuk meningkatkan otonomi desa dimana juga UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang tercakup dalam perogram Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalaui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

persarana desa, pengembanaan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partipasi masyarakat secara langsung.¹

Penelitian ini menggunakan teori Grigg yang menyatakan infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

Pelaksanaan pembangunan suatu daerah perlu mempertimbangkan prinsip perencanaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

¹ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hal.110

² Florentinus Belareq, “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat” ..., hal.706

(PERMENDAGRI) No 54 Tahun 2010 meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.³

Sistem perencanaan memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, setiap daerah telah memiliki sistem perencanaan pembangunan yang baik dan proporsional, namun masih terdapat kelemahan khususnya rencana tata ruang, menurut Tommy Firman selaku guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) bahwa rencana tata ruang belum efektif dalam mengendalikan pembangunan, akibatnya muncul istilah “yang direncanakan tak terbangun, yang dibangun tak direncanakan” sehingga perlu dioptimalkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan.⁴

Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo menjadi salah satu prioritas program pemerintahannya guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara bahwa pemerintah dalam lima tahun mendatang (Tahun 2015-2019) mencanangkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 1.000 km, jalan baru 2.650 km dan

hal.17 ³ Ernady Syaodih. “*Manajemen Pembangunan*”, (Bandung :Refika Aditama, 2015),

⁴ Kompas, Tata Ruang Daerah 29 Desember 2014

pemeliharaan jalan 46.770 km. Pembangunan infrastruktur bidang jalan akan dipacu supaya tercipta konektivitas antarwilayah, sehingga meminimalisir biaya logistik dan menekan biaya ekonomi yang tinggi.⁵

Pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengacu pada hasil sidang Kabinet yang dilaksanakan Bulan Pebruari Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2017 bahwa pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, sehingga penggunaan anggaran negara secara merata berorientasi pada pemberian manfaat untuk rakyat dan memprioritaskan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya berkesinambungan dalam meningkatkan daya saing serta mempercepat pemerataan pembangunan pada tahap kedua pembangunan yang terencana dan sistematis dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sehingga terwujudlah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pedoman bagi Kementerian atau Lembaga terkait untuk lebih kompetitif melaksanakan secara bersama-sama penyusunan rencana strategis dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan pembangunan

⁵ Ir. Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, hal .5

daerahnya masing-masing dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara merata dan optimal melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, agar pelaksanaan efektif dan efisien alokasi dana pembangunan disesuaikan dengan prioritas pembangunan, sebagai berikut :

Tabel 1.1
**Wilayah Pembangunan Infrastruktur Indonesia
 Tahun 2016⁶**

No	Kategori Wilayah Pembangunan	Indikator				
		Skema pembiayaan	Proyek utama	Panjang jalan	Perkiraan kebutuhan dana (Rp. Triliun)	Tahap
1	Wilayah terbangun a. Sumatera b. Jawa c. Bali	Swasta	Tol Trans Sumatera	2.048 km	360 (Pendanaan Konsorsium BUMN)	<i>Ground breaking</i> pada 25 april 2015
2	Sedang membangun a. Kalimantan b. Sulawesi c. Nusa Tenggara	Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)	Ruas Samarinda-Balikpapan dan Manado-Bitung	138 km	14	Pengerjaan pembangunan
3	Minim pembangunan a. Maluku b. Papua	Pemerintah	Kereta Api Sorong-Manokwari	390 km	8 hanya untuk rel	Studi

Sumber : Kementerian PU-PERA, dikutip Tahun 2017

Pemetaan wilayah pembangunan infrastruktur di Indonesia memudahkan perencanaan hingga evaluasi pembangunan, juga

⁶ Seskab. *Pembangunan Infrastruktur Tidak Bisa Ditunda Lagi*, dalam Jendela Pembangunan Daerah, edisi 5 Mei- 5 Juni 2016, hal .4

memudahkan skema pembiayaan baik dari pemerintah maupun investor, melalui fokus utama proyek pembangunan diharapkan pemerintah dapat memantau langsung tahapan dalam peningkatan infrastruktur diberbagai wilayah yang tersebar di Indonesia, sehingga pembangunan wilayah dapat terwujud sesuai kebutuhan dan potensi wilayah baik wilayah pembangunan, sedang membangun maupun minim pembangunan.

Joko Tri Haryanto menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kredibel mendorong pembangunan infrastruktur, memasuki Tahun 2017 pemerintah akan melanjutkan berbagai percepatan program-program pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pada tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun ini sedianya akan dibangun jalan sepanjang 815 km, jembatan sepanjang 9.399 km, pembangunan sekaligus penyelesaian 13 bandara, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi, jalur kereta api tahap I dan lanjutannya, serta modernisasi terminal penumpang di tiga lokasi lanjutan.⁷

Mendukung target pembangunan infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur Tahun 2017 sebesar 377,8 Triliun atau hampir setara dengan 18,6 persen dari total belanja negara, dibandingkan waktu yang sama dalam lima tahun terakhir, alokasi tersebut meningkat sangat signifikan, di Tahun 2012 alokasi belanja infrastruktur masih 9,8 persen total belanja negara, kemudian naik 14,2 persen di Tahun

⁷ Joko Tri H. *APBN Kredibel yang mendorong Pembangunan Infrastruktur*, dalam Media Keuangan, volume XII/No.116/Mei 2017 hal .41

2015 dan 15,2 persen di Tahun 2016. Kenaikan persentase alokasi di Tahun 2017 didukung adanya kewajiban pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang awalnya mayoritas habis untuk belanja gaji dan operasional. Semangat pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja daerah mulai terealisasi.⁸

Pembangunan infrastruktur guna mendorong pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Desa untuk meningkatkan daya saing berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Indonesia mampu meningkatkan daya saing infrastruktur global tercermin dari data indeks daya saing global untuk Indonesia yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) yang terus meningkat dari peringkat 82 Tahun 2014 kemudian pada tahun 2015 peringkat ke 72, menyusul peringkat 62 Tahun 2016 dan peringkat 60 Tahun 2017.⁹

Prestasi yang tercermin dari data indeks daya saing global untuk Indonesia yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan pembangunan infrastruktur secara optimal dengan dibuktikan melalui peningkatan peringkat pada setiap tahunnya. Dampak positif yang diterima Indonesia adalah peningkatan kepercayaan negara-negara lain untuk menanamkan modal di Indonesia dan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia melalui berbagai infrastruktur yang tersedia.

⁸ *Ibid...*, hal .41

⁹ Eduardo S. *Gencar Bangun Infrastruktur, Jokowi Genjot Pertumbuhan Ekonomi RI*. <http://m.detik.com>, diakses 06 Desember 2017

Peningkatan infrastruktur di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi dalam membangun dan mensukseskan program pembangunan pemerintah, baik wilayah terbangun, wilayah sedang membangun maupun wilayah minim pembangunan semuanya ikut andil dalam mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia yang berkembang dan meningkatkan pertumbuhan roda perekonomian, hal ini tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pembangunan nasional secara merata.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan di pulau Jawa sebagai wilayah terbangun tidak terkecuali di Provinsi Jawa Timur, secara administrasi terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Surabaya sebagai Ibukota Provinsi. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai Provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten dan Kota terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Timur terdiri dari empat Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) yaitu wilayah Madiun, wilayah Bojonegoro, wilayah Malang dan wilayah Pamekasan.

Jawa Timur merupakan pintu gerbang perekonomian wilayah timur Indonesia. Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) telah membangun dan mengembangkan sejumlah infrastruktur transportasi guna menunjang segala potensi yang ada di Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, pertumbuhan perekonomian Jawa Timur berada di atas rata-rata pertumbuhan perekonomian nasional. Salah

satu penyumbang terbesarnya adalah dari perhubungan laut, hal ini tentu diimbangi dengan adanya infrastruktur jalan yang memadai.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi guna meningkatkan akses antar wilayah yang dapat menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perekonomian dipandang baik jika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dijalankan secara efisien dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur jalan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Konektivitas infrastruktur wilayah dan antar wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki program proyek strategis dalam bidang infrastruktur dan energi, penelitian ini fokus pada pembangunan infrastruktur, berikut adalah tabel proyek strategis dalam bidang infrastruktur :

Tabel 1.2
**Proyek Strategis Infrastruktur Provinsi Jawa Timur
 Tahun 2015-2019¹⁰**

No	Proyek Pemerintah	Wilayah Pembangunan
1	Pembangunan Jalan	a. Bangkalan-TjBumi-Ketapang-Sotobar-Sumenep b. Bojonegoro-Cepu c. Prigi-Durenan d. Situbondo-Garduatak-Silapak-Ketapang-Banyuwangi
2	Pembangunan Jalan Tol	a. Kertosono-Mojokerto b. Pandaan-Malang (Swasta) c. Solo-Kertosono d. Surabaya-Mojokerto
3	Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur	a. Jarit-Puger-Glenmore b. Talok-Wonorogo-Ngrejo-Prigi-Panggul

Sumber : Matriks Proyek Strategis Provinsi Jawa Timur, dikutip Tahun 2018

Program pembangunan infrastruktur jalan yang akan dibangun pemerintah mulai Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa pemerintah telah mengupayakan pembangunan secara optimal dan merata melalui beberapa titik strategis sebagai penghubung wilayah dan antar wilayah yang dilakukan secara bertahap guna meningkatkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari pembangunan di setiap daerah dan kota, memiliki wilayah yang luas dan kabupaten serta kota yang banyak dapat membangun Provinsi Jawa Timur dari seluruh lapisan masyarakat, melalui prioritas pembangunan infrastruktur jalan, dapat memberikan hubungan timbal balik yang baik antar wilayah serta menghidupkan

¹⁰ Kementerian PPN/BAPENAS, *Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah*, (Mataram : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, 2014) hal. 36

perekonomian kedaerahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini tentu berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari pembangunan Kabupaten dan Kota, salah satunya Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang sedang berkembang terdiri dari 19 Kecamatan dan 271 Desa, peningkatan infrastruktur desa di Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui program optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD) sehingga dapat membangun desa baik sarana prasarana secara bersamaan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi desa di seluruh Kabupaten Tulungagung.

Infrastruktur Kabupaten Tulungagung setelah adanya Otonomi daerah (OTODA) mengalami perubahan, untuk menarik investor menanamkan modal di Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mempercepat pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur seperti pembangunan jalan raya, transportasi, dan irigasi. Peningkatan pembangunan jalan raya selain memperbaiki jalan beraspal yang sudah ada, juga menciptakan jalan baru dengan cara mengaspal jalan yang belum di aspal di seluruh Kabupaten Tulungagung.

Program pembangunan infrastruktur dimulai dari lingkup daerah hingga desa. Pemerintah menggelontorkan anggaran Dana Desa (DD) untuk memulai membangun desa melalui kegiatan yang produktif. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) untuk membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan dan talud atau plengsengan. Penggunaan

Dana Desa (DD) secara optimal pada bidang pembangunan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa yang beriringan dengan pergerakan perekonomian perkotaan melalui terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana.

Desa berpotensi untuk meningkatkan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, agar tepat sasaran. Perencanaan sebagai kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan, semua program peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dari tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), dusun, dan desa.

Teori pembangunan desa menurut Rondinelli yaitu pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan prasarana jalan mempermudah masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti melakukan mobilitas, pemasaran dan mengangkut hasil pertanian masyarakat desa, biaya logistik dan biaya transportasi juga akan lebih murah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pemberian Dana Desa (DD) pada setiap desa untuk membangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diberikan sejak tahun 2015,

¹¹ Yunelimeta. *Pembangunan Pedesaan*. dalam <https://eprints.undip.ac.id>, diakses pada 04 Desember 2017

menggantikan program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa telah memberikan realisasi pembangunan yang cukup baik di beberapa wilayah pedesaan. Dana Desa yang diberikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, Tahun 2015 sebesar 20,77 Triliun kemudian pada Tahun 2016 sebesar 46,98 Triliun dan Tahun 2017 sebesar 60 Triliun. Meningkatnya anggaran Dana Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah semakin selektif dan optimal dalam membelanjakan Dana Desa melalui prioritas beberapa sektor yang perlu dibangun serta ditingkatkan dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Daerah.¹²

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2017 mengalokasikan 70% dana desa yang mencapai satu miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur guna mewujudkan pemberdayaan ekonomi. Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Johozua M Jyoltuwu pada saat acara

¹² Kementerian Keuangan. *Alokasi Dana Desa dalam APBN*, dalam Media Keuangan, volume XII/No.116/Mei 2017 hal.16-17

Indonesia Bagian Timur (IBT) Expo mengatakan, infrastruktur yang dimaksud dapat berupa jalan desa non status (lepas dari tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum) atau gedung pendidikan anak usia dini (PAUD).¹³

Pelaksanaan program mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, terdapat tiga jenis pembangunan infrastruktur desa yang perlu ditingkatkan di Indonesia, pertama adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi pedesaan dan yang terakhir infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan.

Dana Desa (DD) diberikan pada seluruh Kabupaten tersebar di Indonesia untuk meningkatkan program kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali Kabupaten Tulungagung sebagai penerima Dana Desa (DD). Pendistribusian Dana Desa (DD) di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara optimal melalui sosialisasi program, pendampingan, pengawalan dan pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan perencanaan secara partisipatif.

Pembahasan Dana Desa (DD) pada pelaksanaan rapat kerja Kepala Daerah se-Indonesia tanggal 24 Oktober 2017 bertempat di Istana Negara

¹³ Jurnalis-Koran Sindo, *70% Dana Desa untuk Infrastruktur*, dalam <https://economy.okezone.com> diakses pada 21 November 2017

yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) terbaik se-Indonesia kemudian disusul Kabupaten Jembrana Provinsi Bali pada peringkat kedua. Berikut data penggunaan optimalisasi dana desa :

Tabel 1.3
**Penyebaran Dana Desa (DD)
Tahun 2017¹⁴**

No	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Jembrana
1	Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Luas 1.055, 65 km ² terdiri dari 19 Kecamatan dan 271 Desa	Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Luas 841, 80 km ² Terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Desa
2	Penggunaan Dana Desa (DD) telah dibangun : a. 679 km jalan b. 1.975m jembatan	Penggunaan Dana Desa (DD) telah dibangun : a. 129 km jalan b. 8 jembatan c. 4 unit pasar

Sumber : Kutipan Pidato Presiden Republik Indonesia dikutip Tahun 2017

Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah terbangun di Indonesia, selain memiliki potensi yang memadai juga didukung oleh peran investor dalam mensukseskan pembangunan, kedua Kabupaten tersebut berhasil mengoptimalkan program Dana Desa (DD) yang telah diamanahkan pemerintah untuk membangun daerah melalui

¹⁴ Hanni S. *Presiden Apresiasi Tulungagung terbaik manfaatkan Dana Desa*, dalam <https://m.antaranews.com> 2017

pemberdayaan masyarakat dan desa melalui berbagai sektor pembangunan.

Bupati Tulungagung secara eksklusif menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kepala Desa beserta jajaran Pemerintah Desa yang telah bersinergi selama ini sehingga terwujud pengelolaan Dana Desa dengan baik, berikut adalah ucapan terimakasih dari Bapak Syahri Mulyo, SE., M.Si :

“Saya menekankan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Tulungagung serta pendamping profesional agar meningkatkan pembinaan, pengawalan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta pemerintah Ayem, Tentrem, Mulyo lan Tinoto di Kabupaten Tulungagung”¹⁵

Apresiasi peningkatan infrastruktur melalui Dana Desa (DD) diberikan pada seluruh desa di Kabupaten Tulungagung melalui program partisipatif pembangunan wilayah perbaikan jalan, penggantian material maupun pembuatan baru, program ini diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Tulungagung melalui berbagai program peningkatan sarana dan prasarana sehingga terwujudlah pemerintahan Ayem, Tentrem, Mulyo lan Tinoto sesuai dengan visi dan misi Bupati Syahri Mulyo SE., M.Si.

Pemanfaatan Dana Desa (DD) Kabupaten Tulungagung digunakan untuk pembangunan jalan poros dusun, jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan setapak, jalan akses lahan, jembatan roda empat dan jembatan roda

¹⁵ Bupati Tulungagung, Surat ucapan terimakasih Bapak Syahri Mulyo, SE., M.Si kepada Kepala Desa se-Kabupaten Tulungagung. (Tulungagung 09 November 2017)

dua. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Tulungagung secara merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD), dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan.

Penelitian Azizah yang berjudul Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan kurang optimal, dari enam program pembangunan hanya satu program yang berjalan secara optimal yaitu program pembuatan jalan lapen, sedangkan lima program lainnya seperti pembuatan sumur bor, talut penahan tanah, drainase, gorong-gorong dan rabat beton kurang optimal karena anggaran biaya yang dikeluarkan oleh aparat desa dengan harga menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) terdapat selisih biaya yang dianggarkan.¹⁶

Penelitian selanjutnya oleh Riyani membahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) studi kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, program pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut sudah tersampaikan dengan baik untuk pembangunan sesuai perencanaan, dengan sedikit evaluasi. Rencana pengalokasian Dana

¹⁶ Rosfa N. Azizah, *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2017

Desa (DD) seluruhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan, tetap mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan desa, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat optimal dan tepat sasaran.¹⁷

Peneliti melakukan penelitian di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung sebagai desa yang telah mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dengan baik atas rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) dan tenaga pendamping desa Kabupaten Tulungagung. Desa Ngrance sebagai Desa tertib administrasi ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan Dana Desa (DD) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang telah sesuai dengan intruksi pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Desa Ngrance Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari 19 Desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari segi administratif Desa Ngrance memiliki batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara Desa Gebang, sebelah Timur Desa Wates, sebelah Selatan Desa Kasreman dan sebelah Barat Desa Bangunjaya. Berdasarkan wilayah Dusun dibagi menjadi dua yaitu Dusun Ngrance dan Dusun Ploso dengan jumlah 3 Rukun Warga (RW) serta 10 Rukun Tetangga (RT).

¹⁷ Nunuk Riyani, *Analisis Pengelolaan Dana Desa*, (Surakarta : Skripsi, 2016)

Desa Ngrance Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung mengelola Dana Desa (DD) dengan baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan yang baik. Bidang pelaksanaan pembangunan desa melaksanakan pembangunan plesengan atau talud, jalan paving, jalan makadam, jembatan, pembangunan bendungan air, sanitasi lingkungan, pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pengadaan alat kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna, pembangunan perpustakaan desa, sistem informasi desa.

Pembangunan Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung setelah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Dusun hingga tingkat Desa untuk menampung usulan masyarakat serta usulan kebutuhan pembangunan fisik desa. Usulan yang diterima dan disetujui melalui musyawarah akan dijadikan program kerja pemerintah desa, sedang usulan yang tidak diterima dapat diusulkan di tahun yang akan datang.

Pembangunan fisik diharapkan terus memberikan sumbangsuhnya untuk meningkatkan sarana prasarana penggerak roda perekonomian, seperti adanya perbaikan jalan, jembatan, pembangunan jalan paving yang dapat memudahkan konektivitas antar wilayah baik desa maupun luar desa. Pembangunan fisik yang memadai tentu dapat menunjang potensi pasar desa, dikembangkan supaya dapat meningkatkan pendapatan desa serta sebagai wadah masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Wilayah Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yang

luas dengan masyarakat desa bermatapencaharian sebagai petani, mampu menghasilkan padi sebagai komoditas utama.

Sarana prasarana fisik melalui pemanfaatan Dana Desa (DD) bagi Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dianggap penting sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan desa melalui hasil musyawarah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang akan di tindak lanjuti dalam pelaksanaan pembangunan serta menjadi acuan dalam mengoptimalkan program pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, sebagai berikut :

Tabel 1.4

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Pembangunan Plengsengan atau Talud	Pembangunan Plengsengan atau Talud
2	Pembangunan jalan Paving	Pembangunan atau perbaikan jalan Paving
3	Pembangunan jalan Rabat	Pembangunan atau perbaikan jalan Rabat
4	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
5	Pembangunan Dam atau Bendungan air	Pembangunan sanitasi lingkungan atau Drainase
6	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi pada posyandu Balita atau Lansia	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi pada posyandu Balita atau Lansia
7	Pembangunan gedung PAUD atau Swadaya	Pembinaan pengelolaan PAUD Pembangunan gedung TK

Sumber : Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2015 dan 2016

Pelaksanaan bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung diantaranya pelatihan tim pengelola kegiatan, pembinaan fasilitas bantuan hukum kepada masyarakat, pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan,

pengembangan sistem informasi desa, pengembangan potensi desa, pengembangan perencanaan partisipatif, pelatihan usaha ekonomi perikanan, dan pelatihan kewirausahaan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung telah terlaksana dengan baik, penggunaan Dana Desa (DD) diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata, hal ini juga di atur dalam Islam untuk melakukan pendistribusian pembangunan maupun pendapatan guna mencapai kemaslahatan umat.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat menjadi hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ اللَّهُ قَلِيلٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ قُلْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ قُلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya :

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. Al-Qura’an Surat Ar-Ra’d Ayat 11.¹⁸

Al Quran Surah Ar-Ra’d ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran umat. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumberdaya mereka, sehingga masyarakat dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir yang dapat merubah kehidupannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang akan diteliti mengangkat judul “Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kontribusi Dana Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?

¹⁸ Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya*. (Jakarta : PT. Surya Prisma Sinergi 2016) hal. 251

2. Bagaimana kontribusi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kontribusi Dana Desa dalam kualitas pembangunan fisik infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam menunjang perekonomian pedesaan?
4. Bagaimana kontribusi Dana Desa dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam menunjang perekonomian pedesaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kontribusi Dana Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.
2. Mengkaji kontribusi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.
3. Mengkaji kontribusi Dana Desa dalam kualitas pembangunan fisik infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam menunjang perekonomian pedesaan.
4. Mengkaji kontribusi Dana Desa dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam menunjang perekonomian pedesaan.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini mengacu pada peningkatan perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi pembangunan fisik (pembangunan jalan paving, pembangunan *drainase* atau saluran air, pembangunan *talud* atau penyangga jalan, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan makadam) Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dalam menunjang perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan di pasar desa, melalui optimalisasi anggaran Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur secara merata dan meningkatkan mobilitas sosial serta pertukaran ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk manfaat akademik maupun manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Ekonomi Syariah serta sebagai referensi kepustakaan mengenai pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang perekonomian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan program pemerintah, menciptakan pembangunan infrastruktur desa

yang bermanfaat bagi penunjang perekonomian masyarakat sebagai salah satu usaha bersama membangun jantung ekonomi nasional

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk memudahkan memahami sebuah definisi, melalui tinjauan definisi konseptual yang bersumber dari teori para tokoh dan definisi operasional yang telah dibuat oleh peneliti dengan acuan judul dan teori, sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

- a) Peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaikkan, mempertinggi, memperhebat. Peningkatan merupakan proses untuk merubah ke arah yang lebih baik.¹⁹
- b) Infrastruktur menurut Grigg merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.²⁰
- c) Perekonomian menurut Dumairy merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan.²¹

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id>, diakses 28 Februari 2018

²⁰ MA Cakrawijaya. *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan*. (eprints.undip.ac.id : 2013) hal 8

²¹ Dudung, *Pengertian Sistem Ekonomi menurut Para Ahli*, <https://dosenpendidikan.com>

d) Desa menurut undang-undang No.5 tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²²

2. Definisi Operasional

- a) Peningkatan adalah kemajuan menjadi sebuah target dalam suatu pencapaian, proses dan kerja keras dapat memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mampu ke taraf yang lebih tinggi.
- b) Infrastruktur adalah pembangunan fisik yang diperuntukkan untuk publik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara merata, dengan melaksanakan mulai dari tingkat desa, daerah hingga tingkat pusat.
- c) Perekonomian adalah aturan, pengawasan dan pengendalian dalam menjalankan roda ekonomi dengan sungguh-sungguh sehingga mampu merubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera.

²² Rosfa Nur A. *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa melalui program pemberdayaan masyarakat dalam prespektif ekonomi Islam*. (UIN Raden Intan Lampung : 2017)

- d) Desa adalah tempat yang memiliki batas wilayah, masyarakat bersifat homogen, dalam memenuhi kebutuhannya masih bergantung pada alam.

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penyusunan laporan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal : Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi

Bab II Kajian pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian,

pembahasan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran. Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.